



Journal of Finance, Entrepreneurship, and Accounting Education Research

Journal homepage: <https://ejournal.upi.edu/index.php/fineteach>



Pengaruh Tingkat Akuntabilitas, Tingkat Transparansi, dan Tingkat Partisipasi Terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep *Value for Money* Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur

¹Mikanti Annisa Sugrining Rahayu, ²Nugraha Nugraha, ³Arvian Triantoro, ⁴Leni Yuliyanti

¹²³⁴Program Studi Pendidikan Akuntansi, FPEB, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesia

Correspondence: E-mail: mikanti@upi.edu

ABSTRACT

This study aims to examine the effects of accountability, transparency, and participation on budget performance, based on the value-for-money concept, within the Local Government of Cianjur Regency. The research employs descriptive and inferential methods using a quantitative approach. The sample consists of 226 civil servants (Aparatur Sipil Negara/ASN) who are responsible for financial management across all Regional Government Work Units (Satuan Kerja Perangkat Daerah/SKPD) in Cianjur Regency. The sample was determined using a total sampling (census) technique. Data were analysed using descriptive and inferential statistics with IBM SPSS version 29. The results of the descriptive analysis indicate that the levels of accountability, transparency, participation, and value-for-money-based budget performance are all classified as high. Hypothesis testing reveals that accountability, transparency, and participation have positive effects on value-for-money-based budget performance within the Local Government of Cianjur Regency.

© 2025 Kantor Jurnal dan Publikasi UPI

ARTICLE INFO

Article History:

Submitted/Received 1 August 2025

First Revised 20 September 2025

Accepted 1 December 2025

First Available online 31 December 2025

Publication Date 31 December 2025

Keyword:

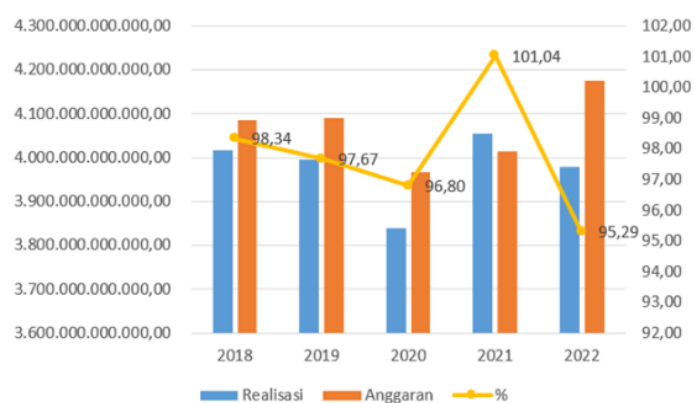
Kinerja anggaran; tingkat akuntabilitas tingkat transparansi; tingkat partisipasi anggaran.

1. INTRODUCTION

Demi memenuhi tercapainya tujuan pembangunan nasional, Pemerintah Republik Indonesia telah mengubah kebijakan sentralisasi menjadi desentralisasi yang ditandai dengan dimulainya pelaksanaan otonomi daerah pada tahun 2001. Sejak saat itu, pemerintah daerah sudah diberikan wewenang dan sumber keuangan baru untuk mendorong proses pembangunan di daerahnya masing-masing, hal ini menunjukkan bahwa sistem pemerintahan dan pembangunan daerah lama yang sangat sentralisasi dan didominasi oleh pemerintah pusat mulai ditinggalkan (Sjafrizal, 2017). Seiring dengan berjalannya reformasi pengelolaan keuangan negara di Indonesia, pemerintah mulai memperkenalkan pendekatan penganggaran berbasis kinerja dalam penyusunan anggaran pemerintah sebagai upaya untuk memperbaiki proses penganggaran di sektor publik. Bastian (2010) menyatakan bahwa prestasi atau hasil kinerja dapat dilihat dengan syarat-syarat ekonomi, efisiensi, dan efektivitas, maka dari itu penilaian kinerja sering dikaitkan dengan value for money. Konsep value for money sangat sejalan dengan konsep anggaran berbasis kinerja, hal ini dikarenakan dalam proses pengelolaannya kedua konsep tersebut lebih memperhatikan komponen input, output, dan juga outcome yang ingin dicapai.

Dalam konteks otonomi daerah, value for money dapat menjadi jembatan bagi pemerintah daerah untuk mencapai tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*). Meskipun demikian, pemerintah selaku sektor publik sering dinilai sebagai sarang inefisiensi, pemborosan, sumber kebocoran dana, dan institusi yang selalu merugi (Mardiasmo, 2018). Hal tersebut dapat terlihat dari banyaknya fenomena yang terjadi terkait dengan pengelolaan anggaran di Indonesia, seperti sebagian besar APBN yang hanya digunakan untuk belanja modal yang tidak produktif, pengalokasian APBD yang tidak jelas kemanfaatannya untuk masyarakat, serta belum optimalnya penyerapan anggaran dan tidak proporsionalnya penyerapan anggaran. Menurut Kementerian Keuangan DJPB (2021), salah satu isu strategis pelaksanaan APBD pada tahun 2021 yaitu beberapa daerah di wilayah Provinsi Jawa Barat masih belum dapat memaksimalkan penggunaan APBD sesuai dengan kebutuhan daerahnya masing-masing.

Kabupaten Cianjur termasuk ke dalam satu diantara banyaknya daerah yang belum dapat memaksimalkan penggunaan APBD sesuai dengan kebutuhan daerahnya, hal tersebut tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur (2021) yang menjelaskan bahwa permasalahan mendasar yang dihadapi oleh bidang urusan keuangan yaitu masih rendahnya kontribusi pendapatan asli daerah terhadap APBD serta belum optimalnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan barang milik daerah. Adapun kinerja anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur digambarkan dalam laporan realisasi anggaran pendapatan pada gambar 1 berikut:



Gambar 1. Data Hasil Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Kabupaten Cianjur Tahun 2018-2022

Sumber: cianjurkab.go.id (diolah)

Dari hasil laporan realisasi anggaran pendapatan di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran pendapatan pada tahun anggaran 2018-2022 belum maksimal dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Hasil laporan realisasi anggaran tersebut mengalami fluktuasi dimana realisasi APBD terkadang mengalami peningkatan dan penurunan dari tahun ke tahun, artinya masih terdapat ketidaktetapan dan perubahan yang tidak menentu atau tidak stabil dalam pelaksanaan APBD. Fenomena lain yang terjadi pada Kabupaten Cianjur dapat terlihat dari adanya penyerapan anggaran yang tidak dilakukan secara optimal, yang ditunjukkan oleh rendahnya persentase penyerapan anggaran selama kurun waktu 5 tahun terakhir. Berikut disajikan persentase penyerapan anggaran periode tahun 2018-2022 berdasarkan laporan realisasi anggaran pada Kabupaten Cianjur.

Tabel 1. Data persentase penyerapan anggaran periode tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Belanja Operasi	94,13	92,46	91,74	93,29	88,87
Belanja Modal	89,88	84,82	89,55	86,80	85,49
Belanja Tidak Terduga	11,19	24,64	84,06	68,03	40,46
Belanja Transfer	99,29	98,60	99,49	99,67	98,99
Belanja Daerah	93,57	91,66	92,57	93,32	89,46

Sumber: BKAD (diolah)

Berdasarkan tabel 1.1 diketahui bahwa selama 5 tahun berturut-turut, penyerapan anggaran tertinggi terjadi pada belanja transfer dan belanja operasi. Sedangkan penyerapan anggaran terendah terutama terjadi pada belanja tidak terduga dan belanja modal. Hal tersebut sangatlah disayangkan, karena program atau kegiatan yang termasuk dalam belanja modal memiliki hubungan langsung dengan penggerak sektor perekonomian dan dapat ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat secara jangka panjang dalam kaitannya dengan penyediaan barang publik. Ditinjau dari sisi pemerintah, kondisi ini akan berpengaruh

terhadap peran anggaran sebagai alat yang digunakan untuk menciptakan stabilitas perekonomian. Selain itu, belum optimalnya kinerja anggaran akan mengakibatkan terhambatnya potensi untuk menggerakkan perekonomian dan memberikan dampak negatif terhadap pengelolaan anggaran dalam memacu pertumbuhan ekonomi, mendukung pembangunan daerah, serta mengurangi angka kemiskinan dan angka pengangguran (Deslina, 2022).

Beberapa peneliti telah mengidentifikasi faktor–faktor yang dapat mempengaruhi kinerja anggaran berkonsep value for money, salah satunya adalah faktor akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Hal ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Laoli (2019) dan Batubara & Risna (2020) yang menyebutkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran berkonsep value for money. Penelitian lain yang dilakukan oleh Safitri & Mildawati (2019) dan Hermanto et al. (2021) menunjukkan hasil bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran berkonsep value for money. Serta penelitian yang dilakukan oleh Safitri & Mildawati (2019) dan Mat et al. (2022) yang menunjukkan hasil bahwa partisipasi memberikan pengaruh positif terhadap kinerja anggaran berkonsep value for money.

Namun, terdapat perbedaan dalam hasil penelitian Arifani et al. (2018) dan Ashari & Kaukab (2020) yang menyatakan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kinerja anggaran berkonsep value for money. Hasil penelitian Shara et al. (2020) dan Nata & Putra (2023) juga mengungkapkan bahwa transparansi tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja anggaran berkonsep value for money. Dari hasil penelitian–penelitian terdahulu, masih terdapat perbedaan yang mengakibatkan terjadinya research gap atau kesenjangan dalam hasil penelitian. Maka dari itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat akuntabilitas, tingkat transparansi, dan tingkat partisipasi terhadap kinerja anggaran berkonsep value for money pada Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur.

2. METHODS

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan inferensial dengan pendekatan kuantitatif. Metode tersebut bertujuan untuk mengetahui gambaran terkait variabel-variabel penelitian yang meliputi tingkat akuntabilitas, tingkat transparansi, dan tingkat partisipasi sebagai variabel independen dan kinerja anggaran berkonsep value for money sebagai variabel dependen, serta untuk menguji hipotesis penelitian. Populasi pada penelitian ini adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Cianjur yang terdiri dari 31 satuan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu metode sampel total atau metode sensus, dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Setiap SKPD diwakili oleh Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran. Sehingga total keseluruhan jumlah

sampel dalam penelitian ini adalah 226 ASN. Teknik pengumpulan data mencakup teknik kuesioner, wawancara, dan dokumentasi. Adapun dalam menganalisis data digunakan teknik analisis deskriptif serta analisis inferensial yang meliputi uji asumsi klasik dan pengujian hipotesis menggunakan regresi linear berganda, uji keberartian model regresi (uji F), serta uji signifikansi koefisien regresi (uji t).

3. RESULTS AND DISCUSSION

Deskripsi hasil penelitian bertujuan untuk mengetahui gambaran terkait tanggapan responden terhadap setiap variabel penelitian. Gambaran tersebut didasarkan pada data yang terkumpul dari penyebaran kuesioner, kuesioner yang disebarakan terdiri dari variabel tingkat akuntabilitas (X1) dengan 14 item pernyataan, variabel tingkat transparansi (X2) dengan 10 item pernyataan, variabel tingkat partisipasi (X3) dengan 6 item pernyataan, dan variabel kinerja anggaran berkonsep value for money (Y) dengan 13 item pernyataan. Berikut ini disajikan hasil analisis deskriptif pada setiap variabel penelitian:

Tabel 2. Rata-Rata Variabel Tingkat Akuntabilitas

Dimensi	Indikator	Skor Rata-Rata	Kriteria
Akuntabilitas dan Hukum	Penghindaran penyalahgunaan jabatan	4,41	Sangat Tinggi
	Kepatuhan terhadap hukum		
Akuntabilitas Proses	Proses dan pertanggungjawaban anggaran	4,15	Tinggi
Akuntabilitas Program	Pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan biaya yang terjangkau		
		Pertimbangan tujuan dapat tercapai atau tidak serta hasil yang optimal dengan biaya yang minimal	4,18
Akuntabilitas Kebijakan	Pertanggungjawaban pemerintah kepada DPRD dan publik	4,19	Tinggi
Rata-Rata Variabel Tingkat Akuntabilitas		4,23	Tinggi

Sumber: Data diolah peneliti

Berdasarkan tabel 2, dapat diketahui bahwa tingkat akuntabilitas memiliki nilai rata-rata sebesar 4,23 yang termasuk dalam kriteria tinggi, artinya tingkat akuntabilitas Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur berada dalam kondisi yang baik. Dengan perolehan nilai rata-rata dimensi tertinggi sebesar 4,41 yaitu dimensi akuntabilitas kejujuran dan hukum serta rata-rata dimensi terendah sebesar 4,15 yaitu dimensi akuntabilitas proses. Dengan kata lain, kondisi tingkat akuntabilitas yang tinggi atau baik ini mencerminkan adanya akuntabilitas yang jujur dan patuh terhadap hukum. Tingginya tingkat akuntabilitas tersebut terlihat dari perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 5 tahun berturut-turut dan nilai evaluasi SAKIP dengan predikat B (Baik). Namun, masih terdapat masalah mendasar dalam

akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, terutama karena pengelolaan keuangan lebih banyak ditangani oleh ASN dengan latar belakang non-keuangan, yang berpotensi menyebabkan hasil yang dicapai tidak sesuai dengan ketentuan. Hal ini mencerminkan kurangnya kompetensi responden sehingga berpengaruh pada hasil akuntabilitas proses yang lebih rendah dibandingkan dengan akuntabilitas lainnya.

Tabel 3. Rata-Rata Variabel Tingkat Transparansi

Dimensi	Indikator	Skor Rata-Rata	Kriteria
Komunikasi Publik oleh Pemerintah	Keterbukaan proses	4,36	Sangat Tinggi
	Kerangka regulasi yang menjamin transparansi		
Hak Masyarakat Terhadap Akses Informasi	Kesediaan dan aksesibilitas dokumen	4,10	Tinggi
	Kejelasan dan kelengkapan dokumen		
Rata-Rata Variabel Tingkat Transparansi		4,23	Tinggi

Sumber: Data diolah peneliti

Berdasarkan tabel 3, dapat diketahui bahwa tingkat transparansi memiliki nilai rata-rata sebesar 4,23 yang termasuk dalam kriteria tinggi, artinya tingkat transparansi Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur berada dalam kondisi yang baik. Dengan perolehan nilai rata-rata dimensi tertinggi sebesar 4,36 yaitu dimensi komunikasi publik oleh pemerintah serta rata-rata dimensi terendah sebesar 4,10 yaitu hak masyarakat terhadap akses informasi. Dengan kata lain, kondisi tingkat transparansi yang tinggi atau baik ini mencerminkan adanya keterbukaan proses dalam pemberian informasi atau pengumuman yang berkaitan dengan anggaran, serta kerangka regulasi yang transparan. Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur menunjukkan tingkat transparansi yang tinggi dengan menyediakan berbagai media, seperti website, media sosial, dan papan informasi, untuk menyampaikan informasi publik kepada masyarakat. Pemerintah juga memfasilitasi masukan, saran, atau kritik masyarakat melalui musyawarah, forum konsultasi publik, survei kepuasan, dan span lapor untuk pengaduan. Meskipun demikian, sangat disayangkan bahwa keterbukaan proses tersebut tidak diimbangi dengan ketersediaan dokumen anggaran yang lengkap dan jelas sehingga hak masyarakat terhadap akses informasi masih belum terwujudkan sepenuhnya.

Tabel 4. Rata-Rata Variabel Tingkat Partisipasi

Dimensi	Indikator	Skor Rata-Rata	Kriteria
Komunikasi Anggaran (<i>Budget Communication</i>)	Keikutsertaan penyusunan anggaran	4,25	Tinggi
	Kebutuhan memberikan pendapat		
Pengaruh Anggaran (<i>Budget Influence</i>)	Besarnya pengaruh terhadap penetapan anggaran	4,27	Tinggi
Rata-Rata Variabel Tingkat Partisipasi		4,26	Tinggi

Sumber: Data diolah peneliti

Berdasarkan tabel 4, dapat diketahui bahwa tingkat partisipasi memiliki nilai rata-rata sebesar 4,26 yang termasuk dalam kriteria tinggi, artinya tingkat partisipasi Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur berada dalam kondisi yang baik. Dengan perolehan nilai rata-rata dimensi tertinggi sebesar 4,27 yaitu dimensi pengaruh anggaran (budget influence) serta rata-rata dimensi terendah sebesar 4,25 yaitu dimensi komunikasi anggaran (budget communication). Dengan kata lain, kondisi tingkat partisipasi yang tinggi atau baik ini mencerminkan adanya pengaruh yang besar dari usulan yang diberikan oleh seluruh unsur pengelola keuangan. Tingginya tingkat partisipasi disertai dengan adanya keterlibatan dan tanggung jawab staf dan pejabat di berbagai SKPD, hal ini membantu membangun hubungan antara atasan dan bawahan sehingga memudahkan penyampaian usulan yang memengaruhi anggaran akhir. Pemerintah juga mengadakan bimbingan dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas pengelola keuangan. Namun, data demografi responden menunjukkan bahwa sebagian besar ASN yang bertanggung jawab atas keuangan belum pernah mengikuti pelatihan terkait anggaran. Hal ini mengindikasikan adanya keikutsertaan penyusunan anggaran dan kebutuhan memberikan pendapat yang lemah, dimana tanpa adanya pengalaman dalam bidang keuangan serta diiringi dengan kurangnya pembekalan terkait anggaran, maka akan menghambat terjadinya komunikasi anggaran (budget communication).

Tabel 5. Rata-Rata Variabel Kinerja Anggaran Berkonsep Value for Money

Dimensi	Indikator	Skor Rata-Rata	Kriteria
Ekonomi	Menghindari pengeluaran yang boros	4,28	Tinggi
	Cermat dalam pengadaan sumber daya		
Efisiensi	Penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu	4,27	Tinggi
	Menurunkan biaya pelayanan publik kinerja		
Efektivitas	Tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan atau pelayanan tepat sasaran	4,39	Sangat Tinggi
Rata-Rata		4,31	Tinggi

Sumber: Data diolah peneliti

Berdasarkan tabel 5, dapat diketahui bahwa kinerja anggaran berkonsep value for money memiliki nilai rata-rata sebesar 4,31 yang termasuk dalam kriteria tinggi, artinya kinerja anggaran berkonsep value for money Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur berada dalam kondisi yang baik. Dengan perolehan nilai rata-rata dimensi tertinggi sebesar 4,39 yaitu dimensi efektivitas serta rata-rata dimensi terendah sebesar 4,27 yaitu dimensi efisiensi. Dengan kata lain, kondisi kinerja anggaran berkonsep value for money yang tinggi atau baik ini mencerminkan adanya ketercapaian hasil program dengan target yang ditetapkan atau

pelayanan tepat sasaran. Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur telah menggunakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) untuk memastikan realisasi anggaran sesuai dengan target pagu. Namun, Kabupaten Cianjur masih sangat bergantung pada dana transfer pusat, dengan pendapatan asli daerah hanya menyumbang sekitar 20% dari total pendapatan. Kinerja anggaran lebih fokus pada penyerapan dana daripada kualitas output atau outcome. Tantangan lainnya adalah sistem pengadaan barang dan jasa yang sering mengalami keterlambatan, menyebabkan penundaan yang mengakibatkan kenaikan biaya dan terjadi penumpukan pada triwulan IV. Hal ini menunjukkan bahwa efisiensi kinerja anggaran berkonsep value for money masih perlu ditingkatkan.

Data dalam penelitian ini telah memenuhi seluruh uji asumsi klasik dimana hasil uji normalitas dengan menggunakan One Sample Kolmogorov-Smirnov Test. memperoleh nilai Asymp. Sig. sebesar $0,087 > 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal. Hasil uji linearitas menunjukkan bahwa tingkat akuntabilitas terhadap kinerja anggaran berkonsep value for money memperoleh nilai sebesar $0,132 > 0,05$, tingkat transparansi terhadap kinerja anggaran berkonsep value for money memperoleh nilai $0,094 > 0,05$, dan tingkat partisipasi terhadap kinerja anggaran berkonsep value for money memperoleh nilai $0,409 > 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan linear antara seluruh variabel independen dengan variabel dependen. Hasil uji heteroskedastisitas menggunakan uji glejser memperoleh nilai signifikansi untuk variabel tingkat akuntabilitas $0,873 > 0,05$, tingkat transparansi $0,376 > 0,05$, dan tingkat partisipasi $0,058 > 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Hasil uji multikolonieritas memperoleh nilai tolerance variabel tingkat akuntabilitas $2,304 > 10$, tingkat transparansi $1,707 > 10$, dan tingkat partisipasi $2,116 > 10$, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolonieritas antar variabel.

Tabel 6. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
	1 (Constant)	4,514	2,170		
X1	0,388	0,050	0,421	7,809	0,000
X2	0,361	0,057	0,293	6,313	0,000
X3	0,514	0,103	0,257	4,973	0,000

Sumber: Data diolah peneliti

Berdasarkan tabel 6 maka dapat diketahui bahwa nilai konstanta menunjukkan nilai sebesar 4,514. Selanjutnya nilai koefisien tingkat akuntabilitas (X1) sebesar 0,388, nilai koefisien tingkat transparansi (X2) sebesar 0,361, dan nilai koefisien tingkat partisipasi (X3) sebesar 0,514, sehingga dapat diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$\hat{Y} = 4,514 + 0,388X_1 + 0,361X_2 + 0,514X_3$$

Dari persamaan regresi linear berganda diatas maka dapat disimpulkan bahwa:

- a. Nilai konstanta sebesar 4,514 memiliki makna bahwa apabila tingkat akuntabilitas, tingkat transparansi, dan tingkat partisipasi bernilai 0 maka kinerja anggaran berkonsep value for money bernilai 4,514.
- b. Nilai koefisien regresi variabel tingkat akuntabilitas bernilai positif sebesar 0,388, artinya apabila terjadi kenaikan pada tingkat akuntabilitas maka akan meningkatkan kinerja anggaran berkonsep value for money sebesar 0,388.
- c. Nilai koefisien regresi variabel tingkat transparansi bernilai positif sebesar 0,361, artinya apabila terjadi kenaikan pada tingkat transparansi maka akan meningkatkan kinerja anggaran berkonsep value for money sebesar 0,361.
- d. Nilai koefisien regresi variabel tingkat partisipasi bernilai positif sebesar 0,514, artinya apabila terjadi kenaikan pada tingkat partisipasi maka akan meningkatkan kinerja anggaran berkonsep value for money sebesar 0,514.

Tabel 7. Hasil Uji Keberartian Model Regresi (Uji F)

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	7256,983	3	2418,994	190,035	<,001 ^b
Residual	2825,884	222	12,729		
Total	10082,867	225			

Sumber: Data diolah peneliti

Berdasarkan tabel 7 dapat diketahui bahwa hasil nilai Fhitung sebesar 190,035 serta nilai Ftabel sebesar 2,645 diperoleh dari taraf signifikansi 0,05 dengan df1 yaitu 3 dan df2 yaitu 222. Berdasarkan data tersebut maka dapat diketahui bahwa nilai Fhitung > Ftabel dan nilai sig 0,001 < 0,05, artinya H0 ditolak dan H1 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi berarti dan dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan kesimpulan.

Tabel 8. Hasil Uji Signifikansi Koefisien Regresi (Uji t)

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	4,514	2,170		2,080	0,039
X1	0,388	0,050	0,421	7,809	0,000
X2	0,361	0,057	0,293	6,313	0,000
X3	0,514	0,103	0,257	4,973	0,000

Sumber: Data diolah peneliti

Dalam penelitian ini, nilai ttabel diperoleh dari taraf signifikansi 0,05 dengan df yaitu 222 dari perhitungan tersebut diketahui bahwa nilai ttabel sebesar 1,971. Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai hasil pengujian dengan rumusan hipotesis dapat dilihat pada uraian berikut.

Berdasarkan tabel 8, dapat diketahui bahwa nilai thitung sebesar 7,809 lebih besar daripada ttabel sebesar 1,971 yang artinya H1 diterima dan memiliki makna bahwa tingkat akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran berkonsep value for money. Dalam hal ini, positif mengandung arti bahwa semakin tinggi tingkat akuntabilitas maka akan semakin tinggi pula kinerja anggaran berkonsep value for money. Penjelasan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan kepala badan keuangan dan aset daerah serta kepala bagian organisasi sekretariat daerah Kabupaten Cianjur, dikatakan bahwa tingginya tingkat akuntabilitas diukur melalui laporan pertanggungjawaban yang diperiksa oleh audit internal dan eksternal. Secara keseluruhan, temuan audit dan evaluasi akuntabilitas yang baik berpengaruh besar terhadap peningkatan kinerja anggaran berkonsep value for money. Pemaparan tersebut sejalan dengan teori agency, dimana agen (pemerintah) melakukan kewajiban untuk menyampaikan kondisi organisasi kepada principal (publik) dalam bentuk akuntabilitas sehingga memungkinkan publik memantau dan menilai penggunaan anggaran yang mengarah pada perbaikan kebijakan. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Laoli (2019), Batubara & Risna (2020), dan Nata & Putra (2023).

Berdasarkan tabel 8, dapat diketahui bahwa nilai thitung sebesar 6,313 lebih besar daripada ttabel sebesar 1,971 yang artinya H1 diterima dan memiliki makna bahwa tingkat transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran berkonsep value for money. Dalam hal ini, positif mengandung arti bahwa semakin tinggi tingkat transparansi maka akan semakin tinggi pula kinerja anggaran berkonsep value for money. Penjelasan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan kepala badan keuangan dan aset daerah, kepala bagian organisasi serta asisten administrasi umum sekretariat daerah Kabupaten Cianjur. Dikatakan bahwa tingkat transparansi yang tinggi memungkinkan lebih banyak masukan, saran, dan kritik dari masyarakat yang digunakan dalam proses perencanaan dan penganggaran, sehingga akan berpengaruh terhadap kinerja anggaran berkonsep value for money yang lebih baik. Sejalan dengan teori agency yang menekankan pentingnya agen (pemerintah) untuk menyampaikan kondisi organisasi kepada principal (publik) dalam bentuk transparansi, sehingga pengawasan publik tersebut akan mendorong pemerintah untuk lebih berhati-hati dan dapat membuat kinerja anggaran berkonsep value for money semakin meningkat. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Arifani et al. (2018), Safitri & Mildawati (2019), Ashari & Kaukab (2020), Hermanto et al. (2021), dan Veronika & Nugareni (2023).

Berdasarkan tabel 8, dapat diketahui bahwa nilai thitung sebesar 4,973 lebih besar daripada ttabel sebesar 1,971 yang artinya H1 diterima dan memiliki makna bahwa tingkat partisipasi berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran berkonsep value for money. Dalam hal ini, positif mengandung arti bahwa semakin tinggi tingkat partisipasi maka akan semakin tinggi pula kinerja anggaran berkonsep value for money. Penjelasan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan kepala badan keuangan dan aset daerah serta kepala bagian organisasi sekretariat daerah Kabupaten Cianjur, dikatakan bahwa tingginya tingkat partisipasi berhubungan dengan penyerapan anggaran yang lebih baik, dimana dengan melibatkan unsur pengelola keuangan, staf, dan pejabat maka anggaran yang dihasilkan akan

lebih realistis dan memudahkan pencapaian target sehingga berdampak positif pada peningkatan kinerja anggaran berbasis value for money. Sejalan dengan teori agency, adanya keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan anggaran memungkinkan unsur pengelola keuangan serta staf dan pejabat untuk bertindak sejalan dengan kepentingan principal (publik) sehingga konflik kepentingan dapat berkurang. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Safitri & Mildawati (2019) dan Mat et al. (2022).

4. CONCLUSION

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dibahas dalam penelitian ini, kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut.

- a. Secara umum, gambaran tingkat akuntabilitas, tingkat transparansi, tingkat partisipasi, dan kinerja anggaran berkonsep value for money pada Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur termasuk ke dalam kriteria tinggi.
- b. Tingkat akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran berkonsep value for money, artinya semakin tinggi tingkat akuntabilitas maka akan semakin tinggi pula kinerja anggaran berkonsep value for money pada Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur.
- c. Tingkat transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran berkonsep value for money, artinya semakin tinggi tingkat transparansi maka akan semakin tinggi pula kinerja anggaran berkonsep value for money pada Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur.
- d. Tingkat partisipasi berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran berkonsep value for money, artinya semakin tinggi tingkat partisipasi maka akan semakin tinggi pula kinerja anggaran berkonsep value for money pada Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur.

5. REFERENCES

- Arifani, C., Salle, A., & Rante, A. (2018). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran Berbasis Value For Money (Studi Empiris Pada Pemerintah Kota Jayapura). *Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah*, 13(1), 68–82.
- Ashari, M. I., & Kaukab, M. E. (2020). Analisis Kinerja Anggaran Berkonsep Value For Money. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis, Dan Akuntansi*, 2(5).
- Bastian, I. (2010). *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Erlangga.
- Batubara, Z., & Risna, R. (2020). Pengaruh Akuntabilitas, Partisipasi Dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep Value For Money Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 4(1), 95–109.
- Deslina. (2022, September 2). Peningkatan Kualitas Perencanaan Dalam Rangka Optimalisasi Penyerapan Anggaran. Kementerian Keuangan RI DJPB.

- Hermanto, F. T. W., Widiyanto, A., & Aryanto, A. (2021). Analisis Determinasi Kinerja Anggaran Dengan Konsep Value For Money Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Tegal. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 5(2), 502–512.
- Kementerian Keuangan DJPB. (2021). *Kajian Fiskal Regional Tahun 2021*.
- Laoli, V. (2019). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep Value For Money Pada Pemerintah Kabupaten Nias. *Riset & Jurnal Akuntansi*, 3(1).
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. ANDI.
- Mat, T. Z. T., Saad, N. A. M., Arshad, R., Roni, S. M., & Urus, S. T. (2022). Accountability Through Budget Performance: A Study On Budget Adequacy And Participation Of Malaysian Local Government. *International Journal of Business and Emerging Markets*, 14(1), 1.
- Nata, A. A. G. D. S. D., & Putra, C. G. B. (2023). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Terhadap Kinerja Anggaran Pada Instansi Pemerintah Se-Kota Denpasar. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 236–247.
- Safitri, D. D., & Mildawati, T. (2019). Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Anggaran (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Surabaya) Titik Mildawati Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(3).
- Shara, Y., Ovami, D. C., & Humairah, R. (2020). Analisis Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Anggaran Dengan Konsep Value For Money Padarsud Djoelham Binjai. *Journal of Trends Economics and Accounting Research*, 1(1), 13–17. <https://journal.fkpt.org/index.php/jtear>
- Sjafrizal. (2017). *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi Daerah*. Rajawali Pers.
- Veronika, P., & Nugraeni. (2023). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran Dengan Konsep Value For Money. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 7, 938–948.